

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA TERHADAP
INVESTASI, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) DI JAWA TIMUR
(Studi Komparatif Tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan
Kota Periode Tahun 2001-2005)**

Oleh :

ALIADI IKA

**Alumni Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi
Pascasarjana – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

ABSTRACT

This research is ratio analysis APBD modeling by comparing / attainment result of comparability (outcome) every periodisation of exercise of APBD the Government of regency and the Government of city in East Java, so that trends of standard performance knowable of its the area and influence to Invests and Gross Regional Domestic Product (PDRB). Step research and Process result of analysis and statistic model SPSS of 12 for windows solution based calculation discriminant analysis, of financial performance analysis 38 (thirty eight) the Government of regency and the Government of city in East Java in time line the year 2001-2005 obtained result that from in general covering growth APBD, Independency, Effectivity, Routine Expenditure activity and development expenditure activity, what has good standard performance there is fourth the Government of regency and the Government of city. Parsial Least Square (PLS) express, hence growth of Invests does have an effect on doesn't have significant influence to growth PDRB, this thing is caused by the investment data is acceptance data / recommendation of approved Domestic Investment (PMDN) and approved Foreign Investment data (PMA), mean investment recommended has not entirely having operational or is not able yet to realized by some things, for example delaying it investors enthusiasm to inculcate its the legal capital in East Java, so well as invesment of capital with the low labour absorbtion, so Investment contribution has not given positive impact to earnings of public or multiplier

effect investment has not been realized so that investment to PDRB declines / decreases.

Key word : *Financial performance, Investment, Gross Regional Domestic Product*

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Sebelum tahun anggaran 1967/1968 pelaksanaan anggaran dimulai 1 januari dan berakhir 31 desember, dan sejak tahun 1967 RAPBN dan RAPBD di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 april sampai dengan 31 maret tahun berikutnya. Kemudian seiring tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah, maka sebagai kebijakan pelaksanaan otonomi daerah mulai tahun 2000, tahun anggaran dimulai 1 januari dan berakhir 31 desember, namun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD tahun anggaran 1999/2000, yang berakhir 31 maret 2000 pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran 2000, dimulai 1 April 2000 sampai dengan 31 desember 2000, dan sejak tahun anggaran 2001 mulai dilaksanakan tahun anggaran dimulai 1 januari dan berakhir 31 desember, hal ini sama dengan pelaksanaan tahun anggaran sebelum tahun 1967/1968 .

Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, baik itu pelaksana (eksekutif) dan legislatif, harus berfokus pada kemampuan pemerintah daerah dalam merevitalisasi ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Proses politik daerah sebaiknya sesuai dengan esensi ekonomi daerah. Mengingat anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan baik pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang. Richard A. Musgrave dalam Suparmoko (Ekonomi publik 2002:26), sebagai alat control atau pengawasan anggaran (budget) mempunyai 3(tiga) macam fungsi utama yaitu fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat (publik), fungsi perbaikan distribusi pendapatan dan fungsi stabilitas perekonomian.

Masalah transparansi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dalam penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan daerah seharusnya dapat menciptakan *well informed society* sehingga pada akhirnya akan terwujud *public accountability*. Untuk itu Laporan Keuangan Daerah harus bisa memberikan *true and fair informatif* atas kinerja keuangan pemerintah daerah kepada berbagai kelompok *stakeholder eksternal* dan *internal*. Informasi pengelolaan keuangan daerah harus mampu memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada kedua kelompok *stakeholder* tersebut. (Borgonovi and Anessi Pessine 1997 dalam Mardiasmo 1997:563), yang termasuk *stakeholder eksternal* :

1. masyarakat sebagai konsumen jasa publik
2. masyarakat sebagai pembayar pajak
3. perusahaan dan organisasi sosial dan ekonomi lainnya yang menggunakan jasa publik sebagai input untuk aktivitas mereka
4. Instansi internasional yang bertanggungjawab dan berkepentingan terhadap integrasi ekonomi, integrasi politik dan *konvergensi* keuangan (seperti Uni Eropa, World Bank, IMF DII)
5. Investor asing dan *country analyst*
6. generasi masa depan, dalam hubungannya dengan distribusi konsumsi antar waktu, penciptaan utang dan pembayaran kembali hutang pemerintah, penciptaan pembelian dan penjualan aset pemerintah.

Sedangkan *stakeholder internal* meliputi :

1. Lembaga-lembaga negara (seperti kabinet, DPD, DPRD dan kelompok politik, misalnya partai-partai politik)
2. Manajer publik (gubernur, bupati, Direktur BUMN/BUMD dan lain-lain)
3. Karyawan atau aparatur pemerintah
4. Serikat dagang sektor publik

Perubahan sistem penganggaran, pertanggungjawaban, dan sistem akuntansi pemerintahan, merupakan eksistensi regulasi dibidang akuntansi sektor publik, audit sektor publik, manajemen keuangan sektor publik dan area

sektor publik lainnya yang mutlak diperlukan untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan desentralisasi yang akuntabel.

Dalam konteks APBD, dalam masa reformasi saat ini sangat jelas arti penting Akuntansi Sektor Publik (ASP) untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota. Hal ini disebabkan jumlah Dana Perimbangan baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dapat dipastikan akan menjadi lebih besar. Di samping itu karena kemungkinan dana/uang yang dikelola akan menjadi lebih besar, maka kewenangan pengelolanya juga diperkirakan akan semakin besar. Pada gilirannya hal tersebut menuntut pertanggung jawaban atau akuntabilitas keuangan yang lebih besar. Dalam era otonomi daerah, kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah semakin luas dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri tentu saja memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang diharapkan akan semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Rumusan Masalah

- 1) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur ?
- 2) Apakah kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) ?
- 3) Apakah kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi ?
- 4) Apakah peningkatan investasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB ?

Tujuan Penelitian

- 1) Tujuan umum, ingin menguji kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan menganalisis variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian yaitu kinerja keuangan daerah, Investasi dan PDRB
- 2) Tujuan khusus, ingin menguji variabel-variabel fokus penelitian dengan cara:

- a) Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- b) Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap peningkatan investasi
- c) Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh peningkatan investasi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk menilai tolok ukur kemandirian, efektifitas, aktivitas dan pertumbuhan manajemen keuangan pemerintah daerah
- 2) Menetapkan sifat dan cakupan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah
- 3) Sebagai informasi dan landasan pengambilan keputusan kebijakan dalam penyusunan APBD dan bentuk pembinaan pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah Pusat/ Propinsi
- 4) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang manajemen keuangan daerah, yang juga dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 5) Sebagai informasi bagi para peneliti lain dalam obyek yang sama namun dalam kontek yang berbeda

Tinjauan Pustaka

Kajian Teori

Sistem Anggaran Kinerja (*Performance Budgeting System*)

Sistem anggaran kinerja (*performance budgeting system*) merupakan penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional. Pengembangan sistem anggaran ini diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tahun 1951. Sebagai

penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional maka titik berat perhatian pada sistem anggaran kinerja diletakkan pada segi manajemen anggaran yaitu memperhatikan segi ekonomi dan keuangan pelaksanaan anggaran maupun hasil fisik yang dicapainya. Disamping itu dalam sistem anggaran kinerja ini juga diperhitungkan fungsi dari masing-masing lembaga serta pengelompokan kegiatannya. Sedangkan orientasinya lebih dititik beratkan pada segi pengendalian anggaran serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan setiap kegiatan. Untuk menilai efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan misalnya, maka prosedur anggaran ini dikaitkan secara ketat dengan sistem akuntansinya, terutama sistem akuntansi biayanya. Sehingga dari setiap pengeluaran dapat ditentukan besarnya prestasi yang harus dicapai. Dengan demikian maka dapat pula diukur efisien atau tidaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan karakteristik seperti ini, berarti sasaran yang hendak dicapai dalam sistem anggaran kinerja, harus terlebih dahulu dirumuskan secara jelas. Setelah itu barulah biayanya ditetapkan.

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, dan (4) Lain-lain penerimaan yang sah. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber penerimaan ini dipilah menjadi pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Prinsip-prinsip Belanja Daerah

Berkaitan dengan karakteristik pencapaian *good governance* di atas, maka prinsip-prinsip utama belanja daerah yang harus dipenuhi dalam mencapai *good governance* adalah meliputi akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), transparansi, dan pengendalian. Penjelasan dari prinsip-prinsip diatas adalah sebagai berikut :

Anggaran Kinerja

Secara etimologis bahasa, kata "kinerja" muncul setelah kata "anggaran", bahwa penganggaran kinerja mengkaitkan anggaran dengan

pencapaian kinerja pada tiap mata anggaran yang dikeluarkan. Dengan demikian penganggaran kinerja juga menitik beratkan segi penatalaksana naan (sistem pengendalian manajemen). Jadi, keberhasilan suatu pelaksanaan atau sosialisasi anggaran tidak saja berhenti pada ketaatan realisasi terhadap rencana, namun yang lebih penting lagi adalah hasil dan implikasi kinerja yang diharapkan dari pengeluaran anggaran tersebut. Secara jelas dapat ditekankan bahwa anggaran kinerja disusun berdasarkan pada hasil yang ingin dicapai yaitu tiap jumlah dana yang disediakan/dianggarkan dapat mencapai hasil sesuai dengan harapan masyarakat atau mengutamakan pencapaian hasil yang diharapkan.

Pengertian anggaran kinerja menurut pandangan *Government Performance Result Act* (GPRA) tahun 1994 adalah sebagai berikut : *"Performance budgeting is a systematic approach to help government become more responsive to the taxpaying publik by linking funding to reformance and production."*.Government of Alberta, Canada mendefinisikan anggaran kinerja : *"...is a system of planning,budgeting, and evaluation that emphasizes the relationship between money budgetined and result axpected."*Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program (Ihyaul Ulum MD,2004). Sistem anggaran kinerja memerlukan adanya indikator kinerja, standar kinerja, standar biaya dan *benchmark* dari setiap jenis pelayanan. Endin AJ.Soefihara, Reformasi Pengelolaan anggaran Negara,sistem penganggaran berbasis kinerja (2005) : Penganggaran berdasarkan kinerja adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (*budget entity*).

Didalam anggaran kinerja mengandung tiga unsur pokok yaitu (1) pengeluaran pemerintah diklasifikasikan menurut program dan kegiatan (2) *Performance measurement* (pengukuran hasil kerja) (3) *Program reporting* (pelaporan program). Dengan demikian, pengukuran hasil kerja, efisiensi dan memaksimumkan output merupakan perhatian dalam pencapaian anggaran kinerja. Anggaran kinerja bertujuan menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target evaluasi pelaksanaan kerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output*, sehingga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk

mengimplementasikan hal-hal tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja (*performance*) sebagai kata benda (*noun*) mengandung arti “*thing done*” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 1992:2).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:3) kinerja diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Hawkins (The Oxford Paperback Dictionary, 1979) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut : “*Performance is: (1) the process or manner of performing, (2) a notable action or achievement, (3) the performing of a play or other entertainment*”. Sementara Bernardin dan Russel (1993) mendefinisikan kinerja (*performance*) sebagai: “ *... as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*” (...adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja yang tinggi merupakan suatu prestasi bagi setiap organisasi dan bagian (unit) organisasi yang oleh karenanya setiap organisasi dituntut untuk dapat selalu meningkatkan kinerjanya. Semakin tinggi kinerja organisasi, semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika, Prawirosentono(1992:2). Konsep kinerja itu sendiri menurut Rummler dan Brache (dalam Salusu, 1998) dapat diterapkan pada tiga tingkatan dalam organisasi, yaitu tingkatan organisasi (*organization level*), tingkat proses (*process level*), dan tingkat tugas atau pelaksana tugas (*job performer level*).

Pertumbuhan ekonomi, PDRB dan Investasi

Pertumbuhan ekonomi

Dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi hidupnya (Todaro). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999; Blakely, 1989). Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya penyimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Mudrajad kuncoro (2004), mengemukakan menurut pandangan para ekonomi klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan JS Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

- (1) jumlah penduduk
- (2) jumlah stok barang modal
- (3) luas tanah dan kekayaan alam
- (4) tingkat teknologi yang digunakan.

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk Daerah makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* suatu propinsi, kabupaten dan kota.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Selanjutnya dikemukakan Boediono (1985:1), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi suatu proses mengandung unsur dinamis dari suatu perekonomian, dan kenaikan output per kapita yang

menjadi perhatian yaitu sisi *output totalnya* (GDP) dan sisi jumlah penduduk. *Output per kapita* adalah output total dibagi jumlah penduduk. Kemudian pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999). Alat analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sedangkan untuk tingkat wilayah, propinsi, Kabupaten/ kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi ditingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB dan sebaliknya. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing propinsi bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Didalam perekonomian suatu negara masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dan sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa diperlukan barang lain yang disebut faktor produksi. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (*regional*) tertentu dalam waktu tertentu. (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB dapat dihitung dengan dua cara: PDRB dengan minyak gas atau tanpa minyak gas. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan PDRB riil (harga konstan) atau nominal (harga berlaku). Tetapi pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil akan memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata, karena PDRB riil tidak menghitung memasukkan inflasi. (Mudrajad Kuncoro, 2004:84). PDRB per kapita adalah nilai hasil pembagian dari PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk

pertengahan tahun, dalam arti semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah, semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa suatu wilayah.

Peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku ini masih mempunyai keterbatasan, yaitu belum menunjukkan peningkatan sebenarnya dari daya beli per kapita karena hal berikut :

- a. PDRB per kapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan penguasaan asset dan penerimaan balas jasa faktor produksi, angka ini baru memberi petunjuk rata-rata dalam suatu wilayah
- b. Tingkat kenaikan harga masih ada didalamnya
- c. Tingkat pertumbuhan penduduk juga berpengaruh

Investasi

Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Umumnya Investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil dimaksudkan adalah investasi terhadap barang – barang yang tahan lama (barang – barang modal) yang akan digunakan untuk proses produksi. Jenis investasi ini dibedakan lagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Investasi tetap perusahaan (*Business Fixed Investment*)
2. Investasi untuk perumahan (*Residential Construction*)
3. Investasi perubahan bersih persediaan perusahaan (*net change in business inventory*).

Kemudian investasi finansial merupakan investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi dan lain sebagainya. Pertimbangan – pertimbangan utama yang perlu dilakukan dalam melakukan (memilih) suatu jenis investasi adalah tingkat bunga yang berlaku (i), tingkat pengembalian (*rate of return*) dari proyek investasi dan prospek (harapan

berkembang) dari proyek investasi pada waktu yang akan datang. Kriteria pengambilan keputusan untuk investasi riil adalah dengan melihat tingkat pengembalian (*rate of return*) dari proyek investasi tersebut. Apabila tingkat pengembalian dari proyek jenis ini lebih besar daripada tingkat pengembalian dari proyek investasi jenis lain, maka proyek investasi riil akan menguntungkan jika dilaksanakan. Tingkat pengembalian dari investasi riil disebut dengan *Marginal Efficiency of Capital (MEC atau r)* sedangkan tingkat pengembalian dari investasi finansial, terutama obligasi adalah tingkat bunga (*i*) yang berlaku. Untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian dari jenis investasi riil ($MEC = r$) dapat dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

$$C = \frac{R_1}{(1+r)} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \frac{R_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{R_n}{(1+r)^n} + \frac{S}{(1+r)^n}$$

Dimana :

C : biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi hingga siap untuk dipakai.

$R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$: adalah besarnya penerimaan yang diperkirakan dari mengoperasikan investasi.

1,2,3,.....,n : adalah periode waktu dari masing-masing penerimaan.

S : adalah nilai residu (nilai sisa) dari investasi setelah umur ekonomis dari investasi tersebut dinyatakan habis.

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap PDRB dan Investasi

Dalam manajemen keuangan yang merupakan suatu perwujudan terhadap persoalan keputusan-keputusan pencarian dana dan penggunaan dana. Pada akuntansi sektor pemerintah (ASP), segala keputusan tentang perencanaan dan realisasi penggalan dan penggunaan dana akan tercermin pada laporan anggaran dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat atau nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercermin dari pengelolaan keuangannya yang tercantum dalam APBD. Dalam manajemen pemerintahan, khususnya

pemerintahan daerah, kemampuan mengelola sumber-sumber daya lokal yang terbatas merupakan suatu syarat bagi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengelolaan sumber-sumber daya termasuk sumber daya finansial pada umumnya dalam bentuk upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efisiensi penggunaan sumber dana, serta meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Ketiganya menjadi penting mengingat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berarti harus melaksanakan pembangunan seringkali masih diwarnai dengan fenomena pemborosan dan pengadaan program-program yang tidak sesuai dengan permasalahan riil di daerah (Mardiasmo, 2002).

APBD memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik dalam Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja maupun anggaran pembiayaan atau dalam sistem anggaran tradisional disebut anggaran rutin maupun pembangunan. Bila APBD merupakan besaran anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, maka PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu (dalam satu tahun) . Dengan demikian, APBD merupakan bagian kecil dari PDRB. Namun demikian peran APBD dalam perekonomian tidak dilihat dari besar kecilnya nominal, tetapi dari nilai kebijakan yang dapat menstimulan pertumbuhan ekonomi (PDRB). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan bagian penerimaan APBD secara tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan lain-lain. Berarti PAD tidak dapat dikaitkan secara langsung dalam perhitungan PDRB, tetapi besaran PAD yang diterima Pemerintah Daerah akan mempengaruhi besarnya pengeluaran rutin seperti upah dan gaji, belanja barang, biaya perjalanan dinas dan lain-lain yang dihitung dalam PDRB. Peranan PAD terhadap PDRB memang tidak dapat dilihat hanya dari besarnya saja, namun harus dilihat dari perspektif lain, karena PAD berperan dalam membiayai operasional pemerintahan, maka yang dapat dinilai adalah seberapa besar dampak kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Kebijakan yang berdampak positif terhadap perekonomian tidak selalu berhubungan kuat dengan besarnya anggaran, namun perekonomian yang meningkat akan memberikan dampak peningkatan PDRB.

Penelitian Terdahulu

Mengawali paparan pada bagian penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah manajemen keuangan daerah, dilakukan paparan hasil beberapa penelitian atau studi yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berkaitan dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengukuran kinerja pemerintahan, akuntansi sektor publik dampaknya terhadap desentralisasi

Mardiasmo (2002) juga menjelaskan bahwa Langkah-langkah *Value for money* meliputi Pengukuran ekonomi, Pengukuran efisiensi dan Pengukuran efektifitas serta pengukuran *outcome*.

- a) Pengukuran ekonomi, mempertimbangkan masukan yang dipergunakan
- b) Pengukuran Efisiensi, mengukur rasio output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin besar tingkat efisiensi
- c) Pengukuran Efektifitas, ukuran yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya
- d) Pengukuran Outcome, dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan (Mardiasmo, Smith,1996). Pengukuran *Outcome* memiliki peran *retrospektif* yaitu terkait dengan penilaian kinerja masa lalu dan peran *prospektif* yaitu terkait dengan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang .

Agus Tri Basuki (2003), dalam Analisis kebijakan APBD dari aspek implementasi diberlakukan otonomi daerah (studi kasus pemkot Yogyakarta DIY tahun 1992-2002), menyatakan bahwa PDRB Kota Yogyakarta, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 1993 yaitu sebesar 11%.. Selanjutnya, menjelaskan bahwa hubungan antara PDRB kota Yogyakarta dengan penerimaan daerahnya diperoleh hasil bahwa secara Statistik tingkat PDRB mempunyai hubungan positif dan signifikan, hal ini dibuktikan dengan uji Statistik t yang nilainya lebih besar dari t tabel dengan $\alpha = 10\%$ ditambah dengan keberadaan koefisien determinasi sebesar 0,34, yang artinya penerimaan kota Yogyakarta dapat dijelaskan oleh PDRB kota Yogyakarta sebesar 34% dan 66% dijelaskan oleh variabel selain PDRB (misalnya harga produk,perilaku masyarakat akan ketaatan membayar pajak).

Ragam,(2003) dalam disertasi berjudul “ Peranan Penerapan Manajemen Strategik Pembangunan Daerah dan hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Perkembangan Ekonomi Daerah di Propinsi Jawa Barat pada Pelita VI”, menyatakan bahwa dari 26 daerah Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, hanya empat daerah yang cenderung mampu membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sementara yang lainnya yaitu 22 daerah kabupaten/kota memiliki kebergantungan yang kuat terhadap bantuan dana pemerintah pusat. Dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota yang makin desentralistik merupakan *trigger* (pemicu) untuk mempercepat perkembangan ekonomi.

Sinring, Bahar (2003), dalam disertasi bertujuan untuk mengetahui kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah. bahwa, kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah, ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Sinring, Bahar (2003), bertujuan untuk mengetahui kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah, bahwa Kemandirian pemerintah daerah ditentukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu;

- a) Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD),
- b) Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Pembangunan (PP), dan
- c) Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Rutin (PR).

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, diketahui bahwa kemandirian pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD. Dengan demikian, meningkatnya penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi-daerah.

- a) Bantuan atau subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berpengaruh negatif dan nyata (signifikan) terhadap PAD.
- b) Pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

- c) Pengeluaran rutin yang dianggarkan oleh pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
- d) Produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
- e) Jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap-PAD

Gideon Tribudi Susilo, Priyo Hariadi (2007), bahwa analisis kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah menyebutkan bahwa baik kemandirian daerah maupun aktivitas daerah setelah otonomi daerah tidak lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah, yang terjadi justru sebaliknya yaitu adanya tingkat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap pemerintah pusat (kemandirian lebih rendah pada era setelah otonomi daerah dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah)

Penelitian ini memfokuskan pada kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana rencana anggaran yang ditetapkan dan realisasi APBD yang telah dilaksanakan. Untuk itu studi ini bertujuan memberikan bukti empiris dengan menggunakan sampel data perencanaan APBD dan Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur, sehingga dapat diketahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Hal lain yang menjadi motivasi penelitian adalah karena penelitian-penelitian sebelumnya mengetengahkan dan menekankan analisis dan evaluasi pada unit-unit organisasi sektor publik, dengan konsentrasi pada kinerja manajerial, demikian pula penelitian yang dilakukan Gideon Tribudi Susilo, Priyo Hariadi (2007), kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah yang menganalisis kemandirian daerah dan aktifitas daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

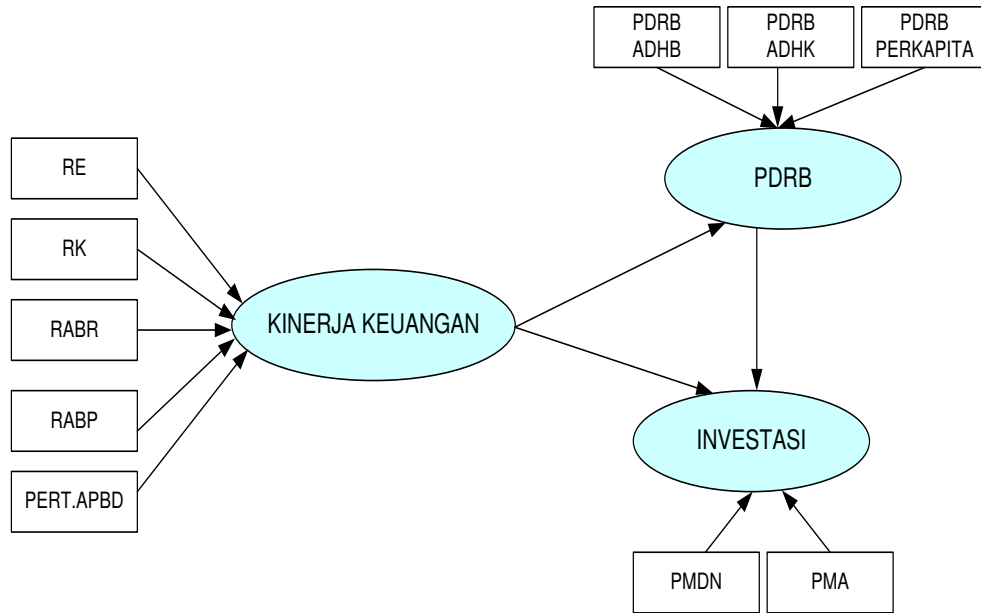
Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terkonsentrasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang meliputi Efektifitas, Kemandirian, Aktifitas Belanja Rutin dan Aktifitas Belanja Pembangunan, yang menghubungkan pengaruhnya terhadap Investasi dan PDRB, dengan studi komparatif membandingkan kinerja keuangan yang baik dan tidak baik . Hal ini dalam manajemen keuangan daerah juga merupakan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga diutamakan akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan daerah, juga ingin mengetahui analisis kinerja keuangan daerah dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah secara makro sehingga dapat diketahui apakah pemerintah daerah tersebut dalam penggunaan anggaran keuangan daerah

secara umum juga efisien, efektif serta apakah aktivitas pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang direncanakan, demikian juga seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan daerah. Jadi peneliti mengetengahkan efektifitas, aktivitas, kemandirian dan pertumbuhan keuangan daerah dalam periodisasi tertentu, yang secara akuntabel juga ingin diketahui oleh masyarakat daerah. Yang kemudian dari manajemen keuangan daerah, khusus perencanaan dan pelaksanaan APBD, bagaimanakah pengaruh *outcomenya* terhadap PDRB, seberapa besar benefit belanja daerah terhadap pembangunan masyarakat (PDRB), dan investasi di daerah. Salah satu upaya peningkatan transparansi pertanggung jawaban pemerintah kepada publik adalah di bidang pengelolaan anggaran. Berdasarkan alasan diatas, maka penelitian ini akan dilakukan pada organisasi sektor publik khususnya yaitu Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam penelitian ini akan memberikan bukti empirik mengenai pengaruh kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota terhadap peningkatan investasi dan Produk domestik regional bruto (PDRB) di Jawa Timur.

Kerangka Konseptual Penelitian Dan Hipotesis

Kerangka Konseptual Penelitian

Selanjutnya secara skematis kerangka konseptual penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dikemukakan indikator-indikator kinerja keuangan daerah dalam hubungannya dengan PDRB dan Investasi sebagaimana gambar 1



Gambar 1 :Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, dalam penelitian ini diajukan hipotesis :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
2. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*)
3. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi
4. Peningkatan investasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kuantitatif pada tingkat penelitian eksplanatif yaitu bagaimana variabel-variabel yang diteliti akan menjelaskan obyek yang diteliti melalui data yang terkumpul. Akan tetapi karena keterbatasan informasi dan keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya ataupun relatif belum banyak dilakukan oleh peneliti yang lain, dan belum banyaknya literatur hasil penelitian yang membahas masalah penelitian. Dan penelitian ini diperlukan untuk menjajaki sifat dan pola fenomena yang menarik perhatian peneliti dan merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dan memberi dukungan informasi berupa klarifikasi masalah untuk melakukan penelitian lebih lanjut ditunjang dengan analisis data sekunder. Hal ini dikemukakan karena penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur terhadap Investasi dan PDRB. Melalui penelitian ini akan menghasilkan temuan ilmiah yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Pengumpulan dan penggunaan data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang meliputi APBD dan Perhitungan APBD, PDRB dan Investasi Tahun anggaran 2001 sampai dengan Tahun anggaran 2005. Dan sebagaimana permasalahan dan hipotesa yang dikemukakan dalam penelitian, maka variabel-variabel yang perlu diidentifikasi dan dianalisis dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur, terdiri dari Pertumbuhan keuangan daerah, Kemandirian, Efektifitas, Aktivitas belanja rutin dan aktifitas belanja pembangunan, dan pengaruhnya terhadap investasi dan PDRB di Jawa Timur.

Untuk membedakan fungsi masing-masing variabel, maka variabel - variabel tersebut diklasifikasikan kedalam :

1. Variabel *construct* atau variabel laten terdiri dari variabel kinerja keuangan daerah, variabel PDRB, variabel investasi.
2. Variabel *manifest* (indikator) yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel laten diatas, dijelaskan pada variabel penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, dan dalam penelitian ini dilakukan penelitian seluruh data Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari APBD, dan Perhitungan APBD, data PDRB, dan Investasi di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel laten terdiri dari : 1).Variabel kinerja keuangan daerah; 2) Variabel PDRB; dan 3) Variabel Investasi

Sedangkan Variabel *manifest* atau indikator masing-masing variabel tersebut diatas adalah :

- a) Variabel kinerja keuangan memiliki lima indikator yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio aktivitas belanja rutin, rasio aktifitas belanja pembangunan dan rasio pertumbuhan APBD
- b) Variabel PDRB meliputi PDRB Atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dan PDRB perkapita.
- c) Variabel investasi meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel konstruk (laten) dengan indikatornya yang dapat dilihat pada Tabel 1. dibawah ini . Agar konsep tersebut dapat diteliti secara empiris, maka perlu dioperasionalkan dengan cara mengubah dan menjabarkannya menjadi satu variabel atau sesuatu yang mempunyai variasi nilai variabel adalah konsep yang memiliki bermacam nilai atau kategori.

Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan dibawah ini.

- a. Rasio Kemandirian (RK), perhitungan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap bantuan pemerintah pusat atau Pemerintah Propinsi

- b. Rasio Efektifitas (RE) adalah perhitungan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang ditetapkan
- c. Rasio Aktifitas Belanja Rutin (RABR) adalah perhitungan anggaran belanja rutin terhadap jumlah APBD
- d. Rasio Aktifitas Belanja Pembangunan (RABP) adalah perhitungan anggaran belanja pembangunan terhadap jumlah APBD
- e. Rasio Pertumbuhan APBD adalah pertumbuhan APBD dari periode ke periode
- f. Rasio Penanaman Modal Asing (PMA) adalah pertumbuhan PMA dari periode ke periode
- g. Rasio Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah pertumbuhan PMDN dari periode ke periode
- h. Rasio PDRB ADHB adalah pertumbuhan PDRB ADHB dari periode ke periode
- i. Rasio PDRB ADHK adalah pertumbuhan PDRB ADHK dari periode ke periode
- j. Rasio PDRB Perkapita adalah Pertumbuhan PDRB Perkapita dari periode ke periode

Tabel 1 : Daftar variabel Konstruk Dan Variabel Manifest

Variabel Konstruk	Indikator
Kinerja keuangan	Y1 = Rasio Kemandirian (RK) Y2 = Rasio Efektifitas (RE) Y3 = Rasio Aktifitas Belanja Rutin (RABR) Y4 = Rasio Aktifitas Belanja Pembangunan (RABP) Y5 = Rasio Pertumbuhan APBD (R Pert)
Investasi	Y6 = Rasio Penanaman Modal Asing (PMA) Y7 = Rasio Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
PDRB	Y8 = Rasio PDRB ADHB Y9 = Rasio PDRB ADHK Y10= Rasio PDRB Perkapita

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah :

1. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur bulan April, Juli dan September 2006
2. Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Timur bulan Juni, Agustus dan September 2006 untuk Perhitungan APBD Tahun 2004 dan Tahun 2005
3. Badan Perencanaan Propinsi Jawa Timur bulan Agustus 2006
4. Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur bulan Agustus 2006

Pengumpulan dan Pengolahan Data Penelitian

Data sekunder diperoleh berupa dokumen-dokumen yaitu laporan APBD dan Perhitungan APBD dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur serta Investasi dan PDRB dari Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur dan Badan Perencanaan Propinsi Jawa Timur.

Metode dan Instrumen Penelitian

Metode dan Instrumen Penelitian ini menggunakan metode teknik dokumentar dengan pengumpulan data terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi APBD, Perhitungan APBD, Investasi dan PDRB pada 38 (tiga puluh delapan) Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur dengan periode pengukuran selama 5 (lima) Tahun yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui 2(dua) tahap: Tahap pertama adalah tahap *measurement model* untuk mengukur indikator-indikator yang membentuk sebuah faktor atau variabel laten baik untuk variabel independen maupun variabel dependen . Dalam penelitian ini pengukuran relatif indikator variabel dalam hal ini rasio kinerja keuangan pemerintah daerah untuk menjelaskan tingkat kemandirian, efektifitas, aktivitas dan pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai variabel laten, maka dalam tahap pertama ini lebih dulu akan menentukan variabel pembeda yaitu analisis diskriminan dengan menghitung rata-rata rasio keuangan dari masing-masing kelompok kinerja keuangan daerah secara komparatif dalam hal ini kinerja keuangan daerah baik dan tidak baik .Tahap kedua, membuat

permodelan struktural yang menggambarkan hubungan-hubungan yang dihipotesiskan antar faktor / variabel, yang menjelaskan kausalitas. Berdasarkan jenis data, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas digunakan analisis *Partial Least Square (PLS)* dalam proses perhitungan data yang ada distandarisasi lebih dulu karena skala pengukuran berbeda.

Sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas penelitian ini menggunakan dua teknik analisis yaitu :

1. Analisis Diskriminan

Analisis diskriminan untuk membedakan kinerja keuangan daerah berdasarkan analisa rasio yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Sebagaimana tujuan dasar analisis diskriminan adalah untuk mengestimasi hubungan antara suatu *single variabel* tidak bebas(terikat) yang *non metrik* dengan satu kelompok variabel bebas yang metrik . Untuk itu, penulis akan menentukan lebih dulu variabel pembeda yaitu dengan menghitung rata-rata rasio keuangan dari masing-masing kelompok kinerja keuangan daerah yaitu kinerja keuangan baik dan tidak baik. Selanjutnya penulis akan menentukan fungsi diskriminan yang dirumuskan dalam fungsi diskriminan berdasarkan *Unstandardized discriminant function* yang merupakan suatu persamaan linear dengan bentuk :

$$Z = W_1X_1 + W_2X_2 + W_3X_3 + W_4X_4 \dots W_nX_n$$

Dimana :

Z : skor diskriminan

W : bobot diskriminan

X : variabel bebas, terdiri dari :

X₁ = rasio kemandirian

X₂ = rasio efektifitas

X₃ = rasio aktivitas

X₄ = rasio pertumbuhan

Metode yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan sampel adalah Wilk's Lamda dengan menguji uji F dengan tingkat signifikansi 5%. Formulasi Wilk's Lamda adalah :

$$\lambda = \frac{\text{Between group of squares}}{\text{Within group sum of squares}}$$

Formulasi perhitungan nilai F(Sharma, 1996) :

$$F = \left[\frac{1-\lambda}{\lambda} \right] \left[\frac{p_1 + n_2 - p - 1}{p} \right]$$

P = jumlah variabel tergantung

N = jumlah kasus

λ = Wilks's Lamda

Pengujian apakah model analisis dapat digunakan dengan melihat taraf signifikan, bila \leq maka model analisis layak digunakan, nampak pada tabel *Wilks's Lamda*

Partial Least Square (PLS)

Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah *Partial Least Square (PLS)*. Imam Ghozali (2006), *Structural Equation Modeling* metode alternatif dengan Partial Least Square PLS menjelaskan bahwa *Structural Equation Modeling (SEM)* sebagai alat analisis telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ada dua model SEM yang banyak digunakan saat ini yaitu, SEM berbasis *covariance* yang diwakili oleh software AMOS dan LISREL dan SEM yang berbasis *variance* atau sering juga disebut *Component Based SEM* dengan software antara lain SmartPLS, PLS Graph. Dengan *component based SEM* distribusi data tidak menjadi masalah, skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal maupun interval dan ratio. Model, kompleks dengan 100 indikator dapat dinalisis hanya dengan jumlah data 50. Model pengukuran indikator dapat berbentuk refleksi maupun formatif. Solimun dan Nurjannah, dalam *Pemodelan Persamaan Struktural Pendekatan PLS dan SEM Aplikasi Software Smart PLS dan Amos* menjelaskan PLS

pertama kali dikembangkan oleh Herman World, Guru dari Karl Joreskog (yang mengembangkan *Structural Equation Model/SEM*). Model ini dikembangkan sebagai alternatif untuk situasi dimana teorinya lemah dan atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran *reflesif*. World menyebutkan PLS sebagai “*soft modeling*”, PLS merupakan metode analisis yang *powerful* karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar. PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian proposisi. Dibandingkan dengan Pendekatan SEM yang sudah banyak digunakan (dengan menerapkan software LISREL, EQS, AMOS, COSAN atau EZPATH), PLS mampu menghindari dua masalah serius, yaitu :

- a. Solusi yang tidak dapat diterima (*inadmissible solution*); hal ini terjadi karena PLS berbasis varians dan bukan *kovarians*, sehingga masalah *matrix singularity* tidak akan pernah terjadi. Disamping itu, PLS bekerja pada model struktural yang bersifat rekursif, sehingga masalah *un-identified*, *under- identified* atau *over-identified* juga tidak akan terjadi.
- b. Faktor yang tidak dapat ditentukan (*factor indeterminacy*), yaitu adanya lebih dari satu faktor yang terdapat dalam sekumuplan indikator sebuah variabel Khusus indikator yang bersifat formatif tidak memerlukan adanya *common factor* sehingga selalu akan diperoleh variabel laten yang bersifat komposit. Dalam hal ini variabel laten merupakan kombinasi linier dari indikator-indikatornya.

Perbedaan pokok dari kedua pendekatan tersebut adalah apakah model persamaan struktural digunakan untuk uji dan pengembangan teori ataukah untuk tujuan prediksi. Imam Ghozali menjelaskan secara filosofis perbedaan antara *covariance based SEM* dengan *componen based PLS* adalah apakah kita akan menggunakan model persamaan struktural untuk menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan prediksi (Anderson dan Gerbing, 1988). Pada situasi mempunyai dasar teori yang kuat dan pengujian teori atau pengembangan teori sebagai tujuan utama riset, maka metode dengan *covariance based (Maximum Likelihood atau Gnerakized Least Square)* lebih sesuai. Namun demikian *indeterminacy* dari *estimasi factor score* maka akan kehilangan ketepatan prediksi. Untuk tujuan prediksi, pendekatan PLS lebih cocok. Dengan pendekatan PLS diasumsikan bahwa semua ukuran *variance* adalah *variance* yang berguna untuk dijelaskan. Oleh karena pendekatan untuk mengestimasi variabel laten dianggap sebagai kombinasi linear dari indikator

maka menghindarkan masalah *indeterminacy* dan memberikan definisi yang pasti dari komponen skore (Wold,1982) PLS memberikan model umum yang meliputi teknik korelasi kanonikal, *redundancy* analisis, regresi berganda, *multivariate analysis of variance (MANOVA)* dan *principle component analysis*

2. Evaluasi model

- a) **Model Pengukuran (*outer Model*)** atau *outer model* dengan indikator *refleksif* dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk keseluruhan indikator. Sedangkan *outer model* dengan indikator formatif dievaluasi berdasarkan pada *substantive content*-nya yaitu dengan membandingkan besarnya *relative weight* dan melihat *signifikansi* dari ukuran *weight* tersebut.

Outer model, dengan indikator *refleksif* masing-masing diukur dengan :

- (a) ***Convergent validity*** : Korelasi antara skor indikator *refleksif* dengan skor variabel latennya. Untuk hal ini *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup, pada jumlah indikator per konstruk tidak besar, berkisar antara 3, sampai 7 indikator
- (b) ***Discriminant validity*** : Pengukuran indikator reflektif berdasarkan *cross loading* dengan variabel latennya. Bilamana nilai *cross loading* setiap indikator pada variabel bersangkutan terbesar dibandingkan dengan *cross loading* pada variabel laten lainnya maka dikatakan valid. Metode lain dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model, jika *square root of average variance extracted (AVE)* konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya maka dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

Direkomendasikan nilai pengukuran harus lebih besar dari 0,50.

$$AVE = \frac{\sum \lambda_1}{(\sum \lambda_1)^2 + \sum 1 \text{ var}(\varepsilon_1)}$$

- (c) ***Composite reliability (pc)*** : kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki *composite reliability* $\geq 0,7$, walaupun bukan merupakan standar absolute

$$Pc = \frac{(\sum \lambda_1)^2}{(\sum \lambda_1)^2 + \sum 1 \text{ var}(\varepsilon_1)}$$

- (d) **Interaction variabel** yaitu Pengukuran untuk variabel moderator, dengan teknik menstandarkan skor variabel laten yang dimoderasi, kemudian membuat konstruk interaksi dengan cara mengalikan nilai standar indikator laten dengan variabel moderator, baru dilakukan interaksi ulang.
- b) **Model Struktural atau inner model** dievaluasi dengan melihat persentase varian yang dijelaskan yaitu dengan melihat R² untuk konstruk laten dependen dengan menggunakan ukuran Stone Geisser Q Square test dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang didapat lewat prosedur bootstrapping. *Goodness of Fit* Model diukur menggunakan *R-Square variabel laten dependen* dengan interpretasi yang sama dengan regresi ; *Q-Square predictive relevance* untuk model *structural*, mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai *Q-Square* > 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance* ; sebaliknya jika nilai *Q-Square* ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevance* . Perhitungan Q-Square dilakukan dengan rumus :

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2)$$

Dimana $R_1^2, R_2^2, \dots, R_p^2$ adalah R-Square *variabel endogen* dalam model persamaan

c) **Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis (β , γ , dan λ) dilakukan dengan metode *resampling Bootstrap* yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Statistik uji yang digunakan adalah t-statistik atau uji t. Dengan demikian asumsi data terdistribusi bebas (*distribution free*), tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel minimum 30). Penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS), karena PLS merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk tujuan prediksi, hal ini terutama pada kondisi dimana indikator bersifat formatif, maka prediksi nilai dari variabel laten dapat dengan mudah diperoleh,

sehingga prediksi terhadap variabel laten yang dipengaruhinya juga dapat dengan mudah dilakukan. PLS sebagai “*soft modeling*”, PLS merupakan metode analisis yang *powerful* karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar. PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian proposisi.

Hasil Penelitian Dan Analisis Hasil Penelitian

Pengujian Hipotesis

Model Analisis Diskriminan (*Discriminant Analysis Modeling*)

Analisis data untuk pengujian pembeda terhadap kelompok kinerja keuangan yang baik dan kelompok kinerja keuangan yang tidak baik dilakukan dengan menggunakan model analisis diskriminan. Untuk membedakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang baik dan tidak baik, dalam penelitian ini dikemukakan variabel-variabel kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi rasio APBD, rasio efektifitas, rasio kemandirian, rasio aktifitas.

a. Menentukan Variabel Pembeda

Dalam menentukan pembeda yaitu dengan menghitung rata-rata rasio kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini kinerja keuangan yang baik dan tidak baik. Pada hasil *analysis discriminant* lampiran II halaman 38 dapat dikemukakan bahwa rata-rata rasio keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode pengamatan Tahun 2001 – 2005 atau efektif perhitungan pertumbuhan selama 4(empat) Tahun yaitu mulai tahun 2002-2005 dan tahun 2001 sebagai tahun dasar, maka yang merupakan nilai rata-rata masing-masing rasio kinerja keuangan dimaksud untuk mengklasifikasikan dua kategori :

- 1) kategori pertama, kelompok kinerja keuangan yang baik, jika nilai rasio diatas rata-rata
- 2) kategori kedua, kelompok kinerja keuangan yang tidak baik jika nilai rasio dibawah rata-rata

b. Uji Statistik *Wilk's Lamda, Univariate F Ratio*

Untuk membedakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dalam kategori baik dan tidak baik secara parsial oleh masing-

masing variabel, maka digunakan uji Statistik *Wilk's lamda*, *Univariate F Ratio*.

Dari hasil uji statistik tersebut, dapat dikemukakan bahwa secara parsial dari 5(lima) variabel yang digunakan dalam penelitian diperoleh hasil bahwa 5(lima) variabel tersebut yang meliputi variabel pertumbuhan rasio APBD, variabel rasio kemandirian, variabel rasio efektifitas, variabel rasio aktifitas belanja rutin dan variabel rasio aktifitas belanja pembangunan terhadap klasifikasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

c. Menentukan fungsi diskriminan

Dalam menentukan fungsi diskriminan yang diperoleh dari analisis diskriminan dengan metode langsung (*direct methode*) adalah fungsi diskriminan yang distandarisasikan (SCDF: *Standardized coefficients discriminant function*) dan fungsi diskriminan yang tidak distandarisasikan (USCDF: *Unstandardized coefficients discriminant function*) yang akhirnya dapat dirumuskan kedalam fungsi diskriminan berdasarkan USDF (*Standardized coefficients discriminant function*) :

$$Z = Z = W_1X_1 + W_2X_2 + W_3X_3 + W_4X_4 \dots W_nX_n$$

$$Z = W_1R_{apbd} + W_2R_k + W_3R_e + W_4R_{abr} + W_5R_{abp}$$

Kemudian untuk mengukur besaran kemampuan diskriminan dari variabel pembeda tersebut, maka nilai Z Score yang tercermin dari angka uji Chi-Square dan Wilk's lambda dengan tingkat signifikansi $\leq \alpha = 0,05$ sebagai berikut :

Tabel 2 : Nilai Z-Score

No	Rasio	Z-Score	Wilk's Lambda	Sign
1	APBD	6,019	0.961	0.014
2	KEMANDIRIAN	6,373	0.958	0.012
3	EFEKTIFITAS	6,731	0.956	0.009
4	AKTIFITAS RUTIN	8,736	0.943	0.003
5	AKTIFITAS PEMB	6,844	0.956	0.010

Sumber : SPSS 12 for Windows

Dari Tabel tersebut diatas signifikansi lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang ditentukan 0,05 (5%), maka 5(lima) variabel – variabel bebas secara signifikan mampu membedakan / mendiskriminasikan kelompok kinerja keuangan yang baik dan kinerja keuangan tidak baik .

d. Menghitung Nilai Diskriminan

Untuk menghitung nilai diskriminan, maka perlu dilakukan perhitungan rata-rata nilai diskriminan untuk masing-masing kelompok kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam fungsi diskriminan, Centroid untuk kelompok kinerja keuangan baik (1) dan kelompok kinerja keuangan tidak baik (0) adalah, sehingga dari nilai centroid pada kedua kelompok kinerja keuangan tersebut dapat dihitung nilai diskriminan/ *cutting score* yang merupakan batas nilai Z antara kelompok kinerja keuangan baik dan kinerja keuangan tidak baik, sebagai berikut :

Tabel 3 : Nilai Z kelompok kinerja keuangan baik dan tidak baik

Variabel	Covariance Matrices		
	Baik	Tidak Baik	Total
Rasio APBD	616.015	231.490	480.658
Rasio Kemandirian	1435.278	607.929	1150.518
Rasio Efektifitas	317.381	154.845	263.366
Rasio Aktifitas :			
1. Belanja Rutin	889.371	5533.409	3382.090
2. Belanja Pembangunan	8183.566	1623.997	6547.118

Sumber : SPSS 12 for Windows

f. Hasil klasifikasi (*Classification Result*)

Dari fungsi diskriminan, maka hasil klasifikasi kedua kelompok kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan nilai diskriminan (Z-Score) nya adalah sebagai berikut :

Tabel 4 : Hasil klasifikasi berdasarkan nilai diskriminan Z-Score

Variabel	Classification Function Coeff	
	Baik	Tidak Baik
Rasio APBD	0.035	0.016
Rasio Kemandirian	0.020	0.007
Rasio Efektifitas	0.011	-0.017
Rasio Aktifitas :		
1. Belanja Rutin	0.003	-0.006
2. Belanja Pembangunan	0.009	0.003

Sumber : SPSS 12 for Windows

Pengujian Partial Least Square (PLS).

Pengujian model struktural terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur, untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung faktor ekstern, pertumbuhan investasi dan pertumbuhan PDRB.

Uji Kesesuaian Model PLS dan Uji Statistik

Langkah permodelan struktural berbasis PLS dengan Software SmartPLS adalah sebagai berikut :

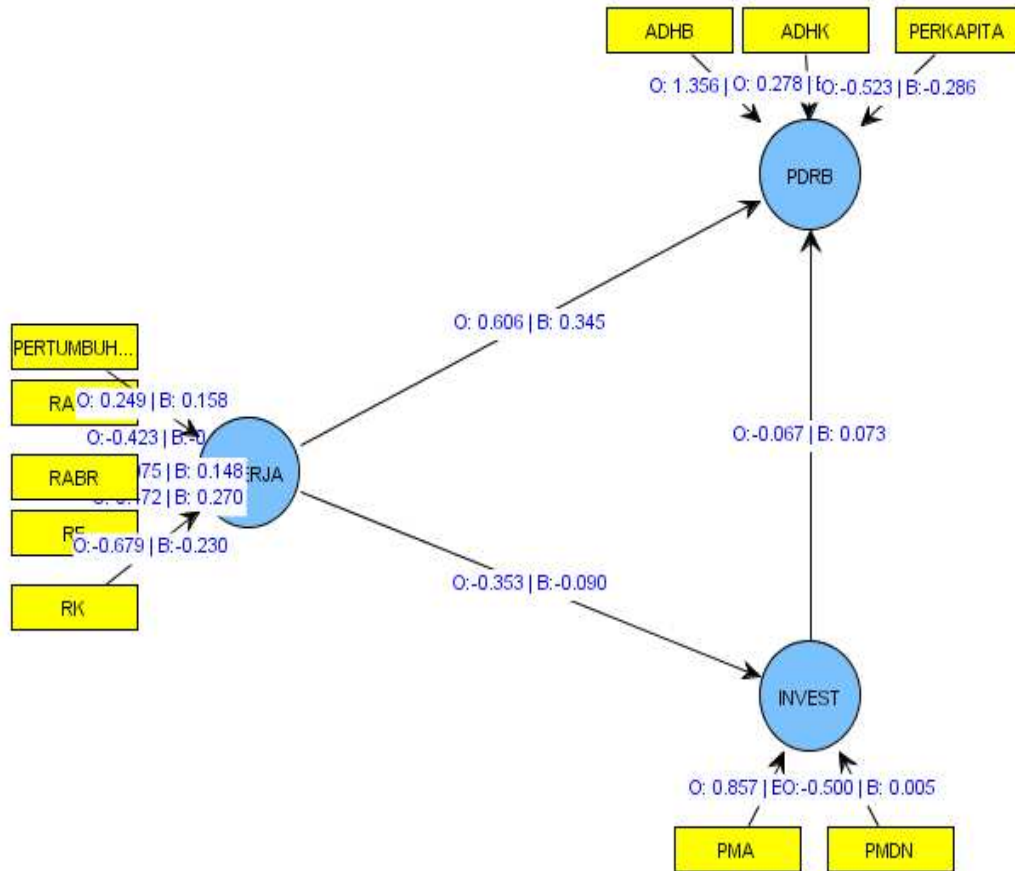
1. Spesifikasi Model, bahwa *iteration of the PLS-Algorithm*, proses iterasi 3(tiga) tahap dalam PLS yang masing-masing tahap menghasilkan estimasi yaitu estimasi penduga bobot (*weight estimate*), *estimasi inner model* dan *outer model* serta *estimasi means* dan lokasi konstanta, yang hasil *outer loading* pada Tabel 5.4 dibawah ini :

Tabel 5 : Outer Loadings (measurement model)

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
KINERJA				
PERTUMBUHAN APBD	-0.007	0.127	0.221	0.032
RABP	-0.594	-0.279	0.480	1.238
RABR	0.597	0.318	0.485	1.230
RE	0.672	0.393	0.480	1.400
RK	-0.573	-0.175	0.547	1.047
INVEST				
PMA	0.866	0.450	0.713	1.214
PMDN	-0.515	0.028	0.553	0.931
PDRB				
ADHB	0.940	0.820	0.276	3.403
ADHK	0.529	0.445	0.404	1.307
PERKAPITA	0.805	0.723	0.250	3.223

Sumber data : Smarts PLS

Dari pengujian *outer model* adalah *convergent validity* dengan indikator *reflektif*. Indikator RE, RK, RABR, RABP dan Rasio Pertumbuhan APBD, PMA, PMDN, ADHB, ADHK, Perkapita sebagai indikator individu dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0,5 atau nilai T.Statistik diatas 2. Dan hasil Struktur model pada Gambar dibawah ini



Gambar 2
Hasil Pengujian Model Struktural Kinerja Keuangan dan pengaruhnya terhadap Investasi dan PDRB

Berdasarkan outer loading diatas pada Tabel 5, indikator Pertumbuhan APBD, RABP, RK, PMDN, memiliki nilai outer loading kurang dari 0,5 atau T-Statistik kurang dari 2. Kemudian model dilakukan pengujian ulang tanpa mengikutkan indikator Pertumbuhan APBD,RABP,RK,dan PMDN yang hasilnya sebagaimana dibawah ini.

Tabel 6 : Result for outer loadings

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
KINERJA				
RABR	0.757	0.794	0.098	7.715
RE	0.870	0.796	0.124	7.006
INVEST				
PMA	1.000	1.000	0.000	
PDRB				
ADHB	1.000	0.960	0.040	25.143
ADHK	0.278	0.254	0.176	1.576
PERKAPITA	0.933	0.881	0.082	11.408

Sumber data : Smarts PLS

Tabel 7 : Correlations of latent variables

	KINERJA	INVEST	PDRB
KINERJA	1.000		
INVEST	-0.321	1.000	
PDRB	0.554	-0.179	1.000

Sumber data :Smarts PLS

Evaluasi *Measurement (outer)* model

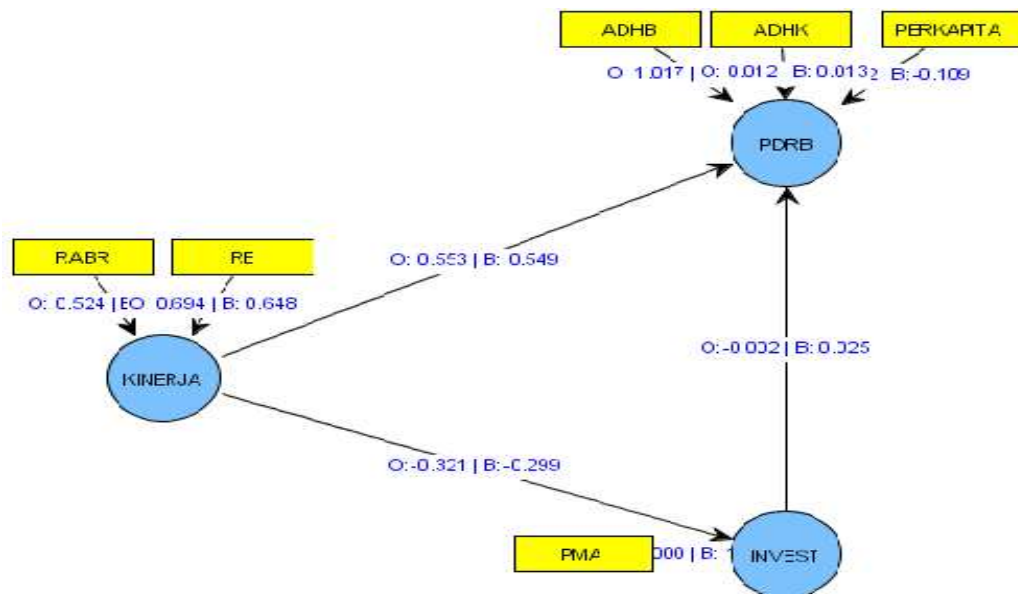
Convergent validity dari *measurement* model dengan indikator refleksi dapat dilihat dari korelasi antara score item/indikator dengan score konstruksya . Indikator dianggap *reliable* jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70. Dari hasil *Bootstrapping* dikemukakan *inner dan outer loading*. Kemudian hasil koefisien jalur struktural dan indikator beserta nilai signifikansinya dapat dilihat pada output sebagaimana Tabel dibawah ini

Tabel 8 : Results For Inner Weights

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
KINERJA -> INVEST	-0.321	-0.188	0.293	1.095
KINERJA -> PDRB	0.553	0.533	0.095	5.830
INVEST -> PDRB	-0.002	0.056	0.150	0.011

Sumber data : Smarts PLS

Hal ini menunjukkan bahwa hanya kinerja keuangan terhadap PDRB yang loading faktor diatas 0,5 dan T-statistik diatas 2. Dan struktur model pada gambar 5.3.



Gambar 3: Hasil Pengujian Model Struktural Kinerja Keuangan dan pengaruhnya terhadap Investasi dan PDRB setelah indikator invalid dikeluarkan

Dari hasil kalkulate dan bootstrapping setelah indikator invalid dikeluarkan maka diperoleh hasil sebagaimana gambar 5.3 yaitu indikator RABR dengan hasil kalkulate 0,524 dan bootstrapping 0,562, RE dengan hasil kalkulate 0,694 dan bootstrapping 0,648 semua indikator tersebut positif, maka merupakan indikator konstruk terhadap variabel kinerja keuangan. Indikator PMA dengan hasil kalkulate 0,1000 dan bootstrapping 0,1000, maka merupakan indikator konstruk terhadap Variabel investasi . Indikator ADHB dengan hasil kalkulate 0,1017 dan bootstrapping 0,944 dan indikator ADHK dengan hasil kalkulate 0,012 dan bootstrapping 0,013 dan indikator Perkapita dengan hasil kalkulate minus 0,022 dan bootstrapping minus 0,019 maka hanya indikator ADHB yang merupakan indikator konstruk terhadap PDRB. Kemudian tingkat signifikansi variabel kinerja keuangan terhadap PDRB menunjukkan nilai kalkulate 0,553 dan bootstrapping 0,549 dan variabel kinerja keuangan terhadap variabel investasi menunjukkan nilai kalkulate minus 0,321 dan bootstrapping minus 0,299. Kemudian variabel investasi terhadap variabel PDRB menunjukkan nilai kalkulate minus 0,002 dan bootstrapping 0,025. Dari hasil pengujian model struktural dinyatakan bahwa kinerja keuangan mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Pembahasan

Pembahasan Masing-masing Variabel Penelitian

Analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota merupakan hasil kerja pemerintah Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan sumber daya dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk melakukan evaluasi kinerja dan mengetahui kemampuan keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah yang meliputi rasio pertumbuhan APBD, rasio kemandirian (RK), rasio efektifitas (RE), rasio aktifitas belanja rutin (RABR) dan rasio aktifitas belanja pembangunan (RABP). Masing-masing rasio tersebut dihitung pertumbuhan setiap tahun selama masa 5(lima) tahun yaitu tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005, sehingga diperoleh data yang diolah pertumbuhan rasio-rasio kinerja keuangan dalam setiap tahunnya, dan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut, kemudian diketahui rata-rata pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dan posisi kinerja keuangannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dalam pengelolaan

keuangan daerah selama kurun waktu 5(lima) tahun, apakah kinerja keuangan baik atau kinerja keuangan tidak baik.

Selanjutnya masing-masing variabel kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur tersebut dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan Investasi dan PDRB.

Hipotesis pertama : Terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur .Dari hasil analisis diskriminan tersebut pada bab V, bahwa terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang mempunyai kinerja keuangan yang baik yaitu Kabupaten Nomor urut 4 , Kabupaten Nomor urut 15, Kabupaten Nomor urut 27 dan Kota Nomor urut 36 .

Hipotesis kedua : Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*). Bahwa kinerja keuangan mempunyai hubungan positif dan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan secara implisit merefleksikan kebijakan fiskal yang dibuat dalam rangka memberikan stimulasi terhadap perekonomian di daerah, sehingga dengan perekonomian di daerah yang semakin meningkat maka akan memberikan dampak terhadap peningkatan PDRB.

Hipotesis ketiga : Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi. Dengan hasil pengujian statistik dikemukakan bahwa kinerja keuangan daerah tidak mempunyai hubungan positif dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Investasi. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur belum melakukan *public investment* sehingga kinerja keuangan belum memberikan prioritas penanaman investasi pemerintah ataupun prioritas kebijakan yang bisa mendorong minat investor menanamkan modalnya.

Hipotesis keempat : Peningkatan investasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB. Dengan penjelasan hasil pengujian statistik tersebut dikemukakan bahwa Investasi terhadap PDRB mempunyai hubungan positif tapi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini disebabkan bahwa pertumbuhan Investasi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur merupakan investasi padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja rendah dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Variabel Kinerja keuangan daerah secara signifikan mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini dapat dijelaskan bahwa APBD merupakan bagian terkecil dari PDRB, namun peran APBD dalam perekonomian tidak dilihat dari besarnya secara nominal, tetapi nilai kebijakan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi (PDRB)
2. Variabel Kinerja Keuangan Daerah tidak mempunyai hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan investasi
3. Variabel Investasi mempunyai hubungan positif tapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan PDRB

Temuan hasil penelitian

Ada beberapa temuan penting dalam penelitian yaitu : bahwa kinerja keuangan daerah mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Dari keseluruhan analisis kinerja keuangan kabupaten/ kota di Jawa Timur tersebut pada 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten / Kota di Jawa Timur dalam periode 5(lima) tahun yang mempunyai kinerja keuangan baik diatas rata-rata berturut-turut mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dalam semua pertumbuhan rasio kinerja keuangan hanya terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang mempunyai kinerja keuangan yang baik . Dari temuan penting dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kinerja keuangan daerah mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Bahwa dari langkah-langkah uji statistik Partial Least Square (PLS) dengan software SmartsPLS, indikator yang membentuk konstruk variabel kinerja keuangan daerah adalah rasio efektifitas dan rasio aktifitas belanja rutin. Rasio efektifitas yang merupakan perbandingan rencana dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahwa penerimaan PAD yang merupakan bagian sisi penerimaan dari APBD, tidak seluruhnya digunakan langsung dalam penghitungan PDRB sedangkan yang digunakan langsung dalam perhitungan PDRB adalah bagian sisi pengeluaran dari APBD dan Rasio aktifitas belanja rutin yang merupakan perbandingan anggaran belanja rutin dengan total APBD. Bahwa kegiatan belanja rutin pemerintah yang dipergunakan untuk biaya-

biaya rutin yang menjadi beban pemerintah yang meliputi belanja pegawai (belanja aparatur), belanja pemeliharaan, belanja barang dan lain-lain yang merupakan bagian perhitungan PDRB. Artinya besaran anggaran belanja rutin merupakan bagian perhitungan langsung dalam PDRB. Hal ini mendukung penelitian Agus Tri Basuki (2003), dalam Analisis kebijakan APBD dari aspek implementasi diberlakukan otonomi daerah (studi kasus pemkot Yogyakarta DIY tahun 1992-2002), menyatakan bahwa hubungan antara PDRB kota Yogyakarta dengan penerimaan daerahnya diperoleh hasil bahwa secara Statistik tingkat PDRB mempunyai hubungan positif dan signifikan. Penelitian ini juga mendukung pendapat ini sesuai dengan Richard A. Musgrave dalam Suparmoko (Ekonomi publik 2002:26), sebagai alat control atau pengawasan anggaran (*budget*) mempunyai 3(tiga) macam fungsi utama yaitu fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat (publik), fungsi perbaikan distribusi pendapatan dan fungsi stabilitas perekonomian. Kemudian dalam buku Jawa Timur dalam angka tahun 2004 yang merupakan kerjasama penelitian Pemerintah Propinsi Jawa Timur Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur mengemukakan bahwa peranan PAD terhadap PDRB memang tidak dapat dilihat hanya dari besarnya saja, namun harus dilihat dari perspektif lain, karena PAD berperan dalam membiayai operasional pemerintahan, maka yang dapat dinilai adalah seberapa besar dampak kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah.

- b. Dari keseluruhan analisis kinerja keuangan kabupaten/ kota di Jawa Timur tersebut pada 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten / Kota di Jawa Timur dalam periode 5(lima) tahun yang mempunyai kinerja keuangan baik diatas rata-rata berturut-turut mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dalam semua pertumbuhan rasio kinerja keuangan hanya terdapat 4 (empat) Kabupaten/ Kota yang mempunyai kinerja keuangan yang baik . Penelitian ini mendukung Disertasi Ragam, (2003) Peranan manajemen stratejik pembangunan daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan Daerah dalam perkembangan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat, bahwa dari 26 daerah Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat hanya 4 (empat) daerah yang cenderung mampu membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Gideon Tribudi Susilo, Priyo Hariadi (2007), bahwa analisis kinerja keuangan daerah bahwa baik kemandirian daerah maupun aktivitas daerah setelah otonomi daerah tidak lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah, yang terjadi justru sebaliknya yaitu

adanya tingkat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap pemerintah pusat (kemandirian lebih rendah pada era setelah otonomi daerah dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah)

Keterbatasan penelitian

Peneliti menyadari bahwa dengan keterbatasan penelitian belum bisa menjawab secara tuntas keterkaitan antara variabel – variabel penelitian tersebut, keterbatasan tersebut diantaranya adalah :

1. Pengungkapan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam penelitian ini tidak disertakan analisa terhadap efisiensi penganggaran atau rasio efisiensi, karena keterbatasan bahkan sulitnya data yang terkait dengan analisa efisiensi tersebut. Hal ini memberikan peluang untuk penelitian mendatang untuk rasio kinerja keuangan lain yang lebih komprehensif, agar diperoleh gambaran yang pasti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan diharapkan bisa menggunakan rasio efisiensi sehingga bisa diketahui sejauhmana rasio efisiensi terhadap penerimaan daerah
2. Sampel yang digunakan hanya Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur sehingga daya generalisasinya rendah. Hal ini memberikan peluang untuk penelitian mendatang diharapkan bisa menggunakan sensus data untuk daerah yang lebih luas pada Kabupaten dan Kota pada 2 (dua) Propinsi atau lebih atau beberapa Propinsi dalam satu wilayah kepulauan, sehingga diperoleh gambaran daya generalisasinya lebih kuat terhadap kecenderungan kinerja keuangan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan proses dan tahapan penelitian serta hasil analisis dan pembahasan yang didasarkan perhitungan discriminant analysis dan *Partial Least Square (PLS)* yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti mengemukakan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian, sebagai berikut :

1. Bahwa ada perbedaaan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dari keseluruhan analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur yang meliputi rasio pertumbuhan APBD, rasio Kemandirian, rasio Efektifitas, rasio Aktifitas belanja rutin dan rasio aktifitas belanja pembangunan, terhadap 38 (tiga puluh delapan) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur

dalam periode 5(lima) tahun, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur yang mempunyai kinerja keuangan baik diatas rata-rata berturut-turut mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dalam semua pertumbuhan rasio kinerja keuangan tersebut terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang mempunyai kinerja keuangan yang baik

2. Kinerja Keuangan Daerah mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB .
3. Kinerja Keuangan Daerah tidak mempunyai hubungan positif dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi
4. Investasi mempunyai hubungan positif tapi tidak berpengaruh secara terhadap pertumbuhan PDRB
5. Pertumbuhan Investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB, hal ini disebabkan data investasi merupakan data persetujuan / rekomendasi ijin Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan data Penanaman Modal Asing (PMA), yang seluruh rekomendasi investasi tersebut belum seluruhnya dapat direalisasi atau masih dalam proses pembangunan sehingga kontribusi Investasi terhadap PDRB menurun / berkurang karena beberapa hal, antara lain menurunnya atau tertundanya minat investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur dan juga sebagian investasi berbentuk padat modal dengan penyerapan tenaga kerja rendah yang kurang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Saran

Setelah mempelajari seluruh proses penelitian yang menyangkut pengaruh kinerja keuangan Pemerintah kabupaten/kota terhadap PDRB dan Investasi di Jawa Timur, maka disampaikan saran sebagai berikut :

Bagi Praktisi

Bagi investor dapat mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan yang terkait dengan kebijakan umum anggaran (KUA) serta kinerja keuangan pemerintah Kabupaten / kota, perkembangan perekonomian dan pendapatan masyarakat di daerah, sehingga berminat untuk menanamkan modalnya di daerah

Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kinerja keuangan Pemerintah daerah terhadap Investasi dan PDRB, disarankan :

- a. Mengingat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara efektif berlaku pada bulan Januari 2007 yang mengharuskan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun Neraca daerah, maka kepada peneliti selanjutnya agar meneliti kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/kota dengan analisis neraca Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, sehingga diketahui kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota misal analisis Likuiditas, Rentabilitas dan solvabilitas.
- b. Menambahkan variabel penelitian, misal variabel efisiensi, variabel pembiayaan dan seterusnya.

Bagi Pemerintah

- a. Bagi Pemerintah Pusat, model analisis tersebut dapat dipertimbangkan sebagai acuan bentuk dalam menganalisa dan mengevaluasi APBD dan Perhitungan APBD Pemerintah Propinsi. Dan bagi Pemerintah Propinsi sebagai acuan bentuk dalam menganalisa dan mengevaluasi APBD Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.
- b. Dalam rangka mengoptimalkan kemandirian daerah, selain mengoptimalkan sumber potensial daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota mengoptimalkan peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak.
- c. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan di daerah agar Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat meningkatkan anggaran belanja pembangunan sehingga aktifitas belanja pembangunan atau belanja modal dapat ditingkatkan dan hasilnya dapat dirasakan langsung untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan dana anggaran secara efisien terhadap aktifitas belanja rutin atau belanja aparatur .

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba empat, Jakarta November 2001
- , *Manajemen Keuangan Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, Januari 2004
- , *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, FE Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, September 2002
- , *Akuntansi, Analisis Investasi*, Salemba empat, Jakarta, Mei 2005
- Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Augusty Ferdinand, *Structural Equation Modeling dalam penelitian manajemen, Aplikasi Model-model rumit dalam penelitian untuk tesis S-2 & disertasi S-3*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, ISSN 979-0156.75-0, Semarang, Agustus 2000.
- Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia (UI-Press), 2002
- Badrul Munir, *Perencanaan Anggaran Kinerja Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*, Samawa Center, Mataram, 2003
- Barry Render, Ralph M. Stair Jr., Michael E. Hanna, *Quantitative Analysis For management*, Prentice Hall, 2003
- BPK Perwakilan III di Yogyakarta, *Pengenalan anggaran kinerja bagi pengelola keuangan daerah propinsi Jawa timur*
- BPKP, Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Manajemen Perubahan*, Jakarta 1999
- BPS Propinsi Jawa Timur, *Jawa Timur dalam angka 2002*
- , *Jawa Timur dalam angka 2003*
- , *Jawa Timur dalam angka 2004*
- , *Jawa Timur dalam angka 2005*

- Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, Marzuki, *Statistik Terapan untuk penelitian ilmu-ilmu sosial*, Gadjah Mada, Modul Peningkatan Ekonomi Strategis Tahun 2000, Jakarta, 16 – 20 Oktober 2000
- Charles P.Jones, North Carolina state University, *Investments analysis and management*, fifth edition, John wiley & sons, Inc
- Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D, Dadang Solihin, MA, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia-Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, *Modul Peningkatan Ekonomi Strategis Tahun 2000*, Jakarta, 16-20 Oktober 2000
- Djoko Mursinto, elastisitas PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur terhadap PDRB dalam rangka persiapan pelaksanaan otonomi daerah, 2004
- Don R.Hansen, Maryanne M.Mowen, *Management Accounting*, International Thomson Publishing
- Donald R.Cooper, C.William Emory, *Metode penelitian bisnis*, Erlangga, Jilid I dan II, Jakarta, 1999
- Endin AJ.Soefihara, *Reformasi Pengelolaan Anggaran Negara, Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005
- Furqon, Ph.D, *Statistika Terapan untuk penelitian*, Alfabeta, Bandung, 1999
- Gede Edy Prasetya, *Penyusunan dan analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Andi Yogyakarta, Juli 2004
- Gideon Tri Budi Susilo, Proyo Hariadi, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah sebelum dan sesudah Otonomi Daerah (Studi empiris di Propinsi Jawa Tengah)*, Konferensi penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama, Pascasarjana UPNV Jatim, Surabaya, 2007
- Goedhart. C, *Garis-garis besar ilmu keuangan Negara*, Djambatan, 1975
- Hadibroto. H.S, *Peranan akuntansi untuk dunia usaha dan pemerintahan dalam era globalisasi*, Pustaka Sinar harapan dan Yayasan Wahana Dharma Nusa, Jakarta, 1998
- Hadi Soesastro, Aida Budiman, Ninasapti Triaswati, Armida Alisjahbana, Sri Adiningsih, *Pemikiran dan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam setengah abad terakhir*, ISEI, Kanisius, 2005

- Hamdy A.taha, university of Arkansas,Fayetteville,*Operation Research*, Prentice Hall,2003
- Hansen/Mowen, *Akuntansi Manajemen*, (Edisi Bahasa Indonesia) Jilid I, Erlangga, Jakarta
- Henry Simamora, *Akuntansi Manajemen*,Salemba Empat,Jakarta, Agustus 1999
- Husein Umar, *Riset Akuntansi*,PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta 1997
- Imam Ghozali, *Structural Equation Modeling Metode alternatif dengan Partial Least Square PLS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Indra Bastian, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Partnership for governance reform in Indonesia, BPFE Yogyakarta,2001
- J.Supranto,Analisis Multivariat,arti dan intepretasi,Rineka cipta,Jakarta,Agustus 2004
- Joseph F.Hair,Jr, Rolph E.Anderson,Ronald L.Tatham, William C.Black, *Multivariate data analysis Fifth Edition*, Prentice Hall International,Inc, 1998
- John Downes,Jordan Elliot Goodman, *Kamus istilah Keuangan dan Investasi*,Edisi ketiga PT.Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta (1995)
- Jurnal Akuntansi & investasi, ISSN 1411-6227 Volume 4 Nomor 2, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Juli 2003
- , ISSN 1411-6227 Volume 5 Nomor 1, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Januari 2004
- , ISSN 1411-6227 Volume 5 Nomor 2, Jurusan Akuntansi FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Juli 2004
- , ISSN 1411-6227 Volume 6 Nomor 1, Jurusan Akuntansi FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Januari 2005
- , , ISSN 1411-6227 Volume 6 Nomor 1, Jurusan Akuntansi FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Januari 2005
- Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, ISSN 1411-9900, Volume 5 Nomor 1, FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Juli 2004

- ,ISSN 1411-9900, Volume 5 Nomor 2,FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Oktober 2004
- , ISSN 1411-9900, Volume 6 Nomor 1, FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, April 2005
- Karl G.Joreskog and Dag Sorbom, Jppsala University, *LISREL 8 User's Reference Guide*, SSI Scientific software international, Januari 1989
- Machfud Sidik,B.raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, Bambang Brodjonegoro, *Dana Alokasi Umum Konsep,Hambatan dan prospek di era otonomi daerah*, Buku Kompas,Jakarta 2002
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta,April 2002
- , *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta, Januari 2002
- M.Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*,Edisi pertama, ANDI Yogyakarta,2001
- Michael P.Todaro,Stephen C.Smith, *Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga*,Erlangga,Jakarta,2004
- Mustopadidjaja AR, *Paradigma-paradigma pembangunan dan saling hubungannya dengan model,strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan*, Lembaga Administrasi Negara
- , *Dimensi-dimensi Sistem administrasi Negara Kesatuan RI*, LAN RI, Duta Pertiwi edition, Jakarta, 2003
- Mohamad Ikhsan, *Skenario pertumbuhan ekonomi jangka menengah 2005-2009*,LPEM UI,Working paper No.9/2005
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, perencanaan,strategi dan peluang*,Erlangga,Kaliurang KM14,Januari 2004
- , *Metode riset untuk bisnis & ekonomi*,Erlangga, Jakarta, 2003
- Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin,Yogyakarta,2000
- Nur Indriantoro, Akuntan, Bambang Supomo,Drs.M.Si, Akuntan, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, Edisi pertama, Agustus 1999

- Pemerintah RI, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
- , Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- , Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah*
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pemerintah Propinsi Jawa Timur, *Analisis indikator makro sosial & Ekonomi Jawa Timur Tahun 1998 – 2002*
- , *Analisis indikator makro sosial & ekonomi Jawa Timur Tahun 2002- 2005*
- R.Cooper, Donald Emory, C. William, *Metode Penelitian Bisnis* Jilid 2, Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999
- Ragam, *Peranan Penerapan Manajemen Stratejik Pembangunan Daerah dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Perkembangan Ekonomi Daerah di Provinsi Jawa Barat pada Plita VI*, Pikiran Rakyat, Bandung 2003
- Revrison Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE Yogyakarta, 1988
- Rico Lesmana dan Rudy Surjanto, *Financial Performance analyzing, Pedoman Menilai Kinerja Keuangan untuk Perusahaan Tbk, Yayasan*,

- BUMN, BUMD dan Organisasi lainnya*, PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, Juni 2003
- Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003
- Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005
- , *Berbagai permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003
- SH, Sarundajang, *Birokrasi dalam otonomi daerah Upaya mengatasi kegagalannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Singih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Pt.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta,
- , *SPSS Mengolah data Statistik secara professional versi 7.5*, Pt.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000
- , *SPSS Statistik Multivariat*, Elex Media Kumputindo, Jakarta, 2002
- Sinring, Bahar (2003), disertasi, Airlangga University Library, Surabaya
- Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Krisis atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Sony Yuwono, Tengku Agus indrajaya, Hariyandi, *Penganggaran sektor publik, Pedoman praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD* (Berbasis kinerja), Bayumedia, Dumai 1`September 2005
- Solimun, *Structural Equation Modeling Lisrel dan Amos*, Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Malang, 2002
- Solimun, Nurjannah, *Permodelan Persamaan Struktural Pendekatan PLS dan SEM, Aplikasi Software Smart PLS dan Amos*, Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2006
- Structrual Equation Modeling*, Fakultas Ekonomi Unair Surabaya, Januari 2003
- Sukanto Reksohadiprojo, *Ekonomi Publik*, 2000